

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengalaman politik istri pejabat merupakan pengalaman yang kompleks, bertahap, dan tidak dapat dipahami hanya sebagai peran pendampingan terhadap suami. Pengalaman politik Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya menunjukkan bahwa posisi sebagai istri pejabat membawa perubahan terhadap kehidupan pribadi, sosial, dan publik mereka. Perubahan tersebut melibatkan proses pembelajaran, adaptasi, negosiasi identitas, pengelolaan citra, serta interaksi dengan struktur sosial-politik lokal.

Dengan menggunakan teori naratif Tzvetan Todorov, pengalaman politik ketiga informan dapat dipahami sebagai proses transformasi yang bergerak melalui lima tahap, yaitu *equilibrium*, *disruption*, *recognition of disruption*, *attempt to repair*, dan *new equilibrium*. Pada tahap *equilibrium*, ketiga informan memiliki kehidupan awal yang relatif stabil sebelum suami mereka memasuki jabatan publik. Krisseptiana memiliki identitas sebagai perempuan profesional, Listyati Purnama Rusdiana memiliki identitas sebagai Aparatur Sipil Negara, sedangkan Inggit Soraya memiliki identitas sebagai wirausahawan. Identitas awal tersebut menjadi modal penting yang memengaruhi cara masing-masing informan memahami dan menjalankan peran sebagai istri pejabat.

Pada tahap *disruption*, masuknya suami ke dalam dunia politik dan jabatan pemerintahan menjadi titik perubahan yang mengganggu keseimbangan awal kehidupan para informan. Posisi sebagai istri pejabat membuat mereka ikut berada dalam ruang publik, menghadapi perhatian masyarakat, menjalankan kegiatan organisasi, serta menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Perubahan tersebut tidak

hanya memengaruhi aktivitas sehari-hari, tetapi juga memengaruhi cara mereka menempatkan diri sebagai pribadi, istri, ibu, profesional, dan figur publik.

Pada tahap *recognition of disruption*, ketiga informan mulai menyadari bahwa peran sebagai istri pejabat membawa tuntutan dan konflik yang tidak sederhana. Krisseptiana menyadari pentingnya menjaga citra dan ketahanan diri di hadapan publik. Listyati menyadari adanya batasan institusional karena statusnya sebagai ASN sehingga harus berhati-hati dalam menunjukkan dukungan terhadap suami. Inggit menyadari adanya tuntutan belajar cepat untuk memahami dunia pemerintahan, organisasi, dan komunikasi masyarakat. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa pengalaman politik istri pejabat tidak hanya terjadi pada tingkat aktivitas, tetapi juga pada tingkat emosional, identitas, dan pemaknaan diri.

Pada tahap *attempt to repair*, ketiga informan melakukan strategi adaptasi dan negosiasi peran yang berbeda. Krisseptiana beradaptasi melalui profesionalisme, ketahanan diri, dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Listyati melakukan negosiasi melalui kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan birokrasi, dan bentuk dukungan senyap terhadap suami. Inggit beradaptasi melalui pembelajaran cepat, keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat, serta pemaknaan peran sebagai amanah. Strategi tersebut menunjukkan bahwa istri pejabat tidak sepenuhnya pasif dalam menjalankan peran, tetapi memiliki cara masing-masing untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial-politik yang dihadapi.

Pada tahap *new equilibrium*, ketiga informan membentuk identitas baru sebagai istri pejabat. Identitas baru tersebut tidak menghapus identitas lama, tetapi memadukan pengalaman sebelumnya dengan tuntutan peran publik. Krisseptiana membentuk identitas sebagai figur publik yang aktif dalam pengabdian sosial. Listyati membentuk identitas sebagai istri pejabat yang berhati-hati, taat pada batas institusional, dan memberikan dukungan dalam bentuk yang tidak selalu terlihat secara terbuka. Inggit membentuk identitas sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat yang memaknai peran publik sebagai tanggung jawab dan amanah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran politik istri pejabat berada dalam spektrum antara peran seremonial dan peran substantif. Peran seremonial muncul ketika istri pejabat hadir sebagai simbol pendamping kepala daerah atau bagian dari protokol sosial-politik. Sementara itu, peran substantif muncul ketika istri pejabat menjalankan kegiatan yang memiliki kontribusi nyata, seperti memimpin organisasi, membangun komunikasi dengan masyarakat, menjadi narasumber, menggerakkan kegiatan sosial, atau mendukung program pemberdayaan. Dengan demikian, istri pejabat tidak dapat hanya dipahami sebagai pendamping simbolik, tetapi juga tidak dapat langsung disamakan dengan aktor politik formal yang memiliki mandat elektoral.

Dalam konteks komunikasi politik, pengalaman ketiga informan menunjukkan bahwa istri pejabat dapat berperan sebagai aktor komunikasi politik nonformal. Mereka membangun hubungan dengan masyarakat melalui organisasi perempuan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, pemberdayaan ekonomi, media sosial, dan komunikasi interpersonal. Komunikasi politik yang dilakukan tidak selalu berbentuk kampanye atau komunikasi elektoral, tetapi hadir melalui kedekatan sosial, pelayanan masyarakat, penguatan citra, dan relasi antara pemerintah daerah dengan warga.

Namun demikian, pengalaman politik istri pejabat tetap perlu dibaca secara hati-hati karena ruang peran mereka tidak sepenuhnya bebas dari struktur kekuasaan. Posisi publik yang mereka miliki sebagian besar terbentuk karena relasi dengan suami sebagai pejabat. Oleh karena itu, pengalaman politik istri pejabat berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, mereka memiliki peluang untuk berpartisipasi di ruang publik dan menjalankan peran sosial yang bermakna. Di sisi lain, ruang tersebut tetap dibatasi oleh jabatan suami, norma gender, aturan institusional, dan ekspektasi masyarakat.

Penelitian ini juga menyadari adanya potensi bias narasi elite karena informan merupakan istri pejabat atau mantan pejabat. Narasi yang disampaikan dapat mengandung kecenderungan menjaga citra diri, citra keluarga, dan citra pemerintahan. Oleh karena itu, pengalaman yang ditampilkan dalam penelitian ini dipahami sebagai narasi subjektif informan yang perlu ditempatkan dalam konteks sosial-politik tertentu.

Verifikasi melalui berita online, dokumentasi kegiatan, dan observasi terbatas menjadi penting untuk memperkuat pembacaan terhadap pengalaman tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman politik istri pejabat merupakan proses transformasi identitas yang dibentuk oleh perubahan peran, komunikasi politik, adaptasi sosial, negosiasi batas, dan pemaknaan subjektif. Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya menunjukkan bahwa istri pejabat tidak hanya menjalankan fungsi pendampingan, tetapi juga dapat menjalankan peran sosial dan komunikasi politik nonformal dalam ruang politik lokal. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa posisi istri pejabat berada di antara simbol pendampingan, kontribusi substantif, peluang partisipasi perempuan, dan batasan struktur kekuasaan yang melekat pada jabatan suami.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan tiga informan yang seluruhnya merupakan istri pejabat atau mantan pejabat. Kondisi ini membuat data penelitian memiliki potensi bias narasi elite. Bias narasi elite muncul ketika informan berada dalam posisi sosial yang tinggi dan memiliki kepentingan untuk menjaga citra diri, citra keluarga, atau citra institusi. Dalam konteks penelitian ini, informan dapat saja menyampaikan pengalaman secara lebih positif, terkontrol, dan selektif karena posisi mereka sebagai figur publik.

Untuk mengurangi potensi bias tersebut, penelitian ini melakukan verifikasi data melalui beberapa cara. Pertama, peneliti membandingkan narasi wawancara dengan berita online yang memuat kegiatan informan. Berita online digunakan untuk melihat apakah kegiatan yang disebutkan informan memiliki jejak publik yang dapat ditelusuri. Kedua, peneliti menggunakan dokumentasi kegiatan, seperti foto, publikasi media sosial, dan dokumen kegiatan, untuk memperkuat informasi mengenai aktivitas informan. Ketiga, peneliti melakukan observasi terbatas terhadap kegiatan yang dapat diakses untuk memahami konteks peran informan dalam ruang publik.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memiliki keterbatasan. Data utama tetap berasal dari wawancara dengan informan sehingga pengalaman yang muncul adalah pengalaman yang diceritakan dan dimaknai oleh informan sendiri. Penelitian ini tidak sepenuhnya dapat menangkap pandangan masyarakat terhadap peran istri pejabat, pandangan bawahan dalam organisasi, atau kritik dari pihak luar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai kajian mengenai pengalaman subjektif istri pejabat, bukan sebagai penilaian menyeluruh terhadap efektivitas peran mereka di masyarakat.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengalaman politik istri pejabat, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

5.3.1 Saran Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa istri pejabat memiliki peran yang lebih kompleks daripada sekadar mendampingi suami dalam kegiatan resmi. Mereka tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga dapat menjalankan peran substantif melalui organisasi perempuan, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dengan warga, serta penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan ruang yang lebih sistematis bagi istri pejabat untuk mengembangkan kapasitas komunikasi publik, kepemimpinan sosial, dan manajemen organisasi.

Pemerintah daerah, khususnya bagian yang berkaitan dengan organisasi perempuan seperti TP PKK, Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan organisasi sosial lainnya, perlu menyediakan program pembekalan bagi istri pejabat. Pembekalan tersebut dapat mencakup komunikasi publik, etika protokoler, manajemen kegiatan sosial, pengelolaan media sosial, pemahaman isu perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta strategi membangun relasi dengan komunitas lokal. Dengan adanya pembekalan

tersebut, peran istri pejabat tidak hanya berjalan berdasarkan pengalaman pribadi atau kebiasaan turun-temurun, tetapi juga didukung oleh kapasitas yang lebih terarah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu membedakan secara jelas antara peran istri pejabat yang bersifat seremonial dan peran yang bersifat substantif. Peran seremonial tetap memiliki fungsi simbolik dalam kegiatan pemerintahan, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya bentuk keterlibatan istri pejabat. Peran substantif perlu diperkuat melalui program yang memiliki tujuan, indikator, dan dampak sosial yang jelas, seperti pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak, literasi masyarakat, serta kegiatan sosial yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Organisasi perempuan yang dipimpin atau melibatkan istri pejabat juga perlu memiliki sistem kerja yang tidak hanya bergantung pada figur istri pejabat. Program-program organisasi sebaiknya disusun secara kelembagaan agar tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepala daerah atau pergantian kepemimpinan organisasi. Hal ini penting agar peran istri pejabat tidak hanya bersifat personal dan simbolik, tetapi dapat menghasilkan keberlanjutan program bagi masyarakat.

Bagi istri pejabat, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kemampuan menyeimbangkan kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan tuntutan publik. Istri pejabat perlu memiliki kesadaran bahwa posisi publik yang melekat pada dirinya membawa konsekuensi sosial, seperti sorotan masyarakat, tuntutan menjaga citra, serta kewajiban berkomunikasi secara hati-hati. Oleh karena itu, kemampuan refleksi diri, pengelolaan emosi, dan pemahaman terhadap batas peran menjadi penting agar istri pejabat dapat menjalankan perannya secara lebih sehat dan proporsional.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa istri pejabat tidak selalu dapat dipahami secara sederhana sebagai pendamping suami. Dalam praktiknya, mereka dapat menjalankan

peran komunikasi politik nonformal melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun, masyarakat juga perlu melihat peran tersebut secara kritis dan proporsional, yaitu dengan membedakan antara kehadiran yang hanya bersifat seremonial dan keterlibatan yang benar-benar memiliki kontribusi substantif bagi publik.

5.3.2 Saran Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman politik istri pejabat dapat dianalisis melalui pendekatan naratif. Teori naratif Tzvetan Todorov membantu menjelaskan pengalaman politik sebagai proses transformasi yang bergerak dari keseimbangan awal, gangguan, kesadaran terhadap gangguan, upaya adaptasi, hingga terbentuknya keseimbangan baru. Oleh karena itu, kajian komunikasi politik dapat memanfaatkan pendekatan naratif untuk memahami pengalaman aktor politik nonformal yang tidak selalu berada dalam struktur kekuasaan formal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh aktor politik formal seperti kepala daerah, anggota legislatif, partai politik, atau tim kampanye. Komunikasi politik juga dapat dilakukan oleh aktor nonformal yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dan masyarakat, termasuk istri pejabat. Dengan demikian, kajian komunikasi politik perlu memperluas perhatian pada aktor-aktor nonformal yang memiliki peran dalam membangun relasi sosial, membentuk citra politik, dan menyampaikan pesan-pesan publik melalui ruang sosial dan budaya.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa komunikasi politik tidak selalu berlangsung dalam ruang elektoral, kampanye, atau media massa. Komunikasi politik juga dapat berlangsung melalui organisasi perempuan, kegiatan sosial, pengajian, komunitas UMKM, kegiatan kesehatan, pendidikan, dan komunikasi interpersonal. Ruang-ruang tersebut dapat menjadi arena komunikasi politik karena di dalamnya terdapat proses

penyampaian pesan, pembentukan kepercayaan, pembangunan citra, dan penguatan relasi antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan catatan bahwa penggunaan teori dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan secara konsisten. Pendekatan naratif sebaiknya ditempatkan sebagai pendekatan utama apabila penelitian berfokus pada pengalaman hidup informan. Sementara itu, teori lain seperti model *encoding-decoding* Stuart Hall dapat digunakan secara terbatas sebagai perangkat bantu kategorisasi data, bukan sebagai teori utama yang menggantikan analisis naratif. Dengan pemisahan tersebut, penelitian menjadi lebih konsisten secara metodologis dan tidak terkesan mencampurkan teori tanpa arah yang jelas.

Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kajian mengenai perempuan di sekitar kekuasaan. Istri pejabat berada dalam posisi yang ambivalen, karena di satu sisi mereka memiliki peluang untuk masuk ke ruang publik, tetapi di sisi lain ruang tersebut masih melekat pada jabatan suami. Oleh karena itu, secara teoritis, kajian mengenai istri pejabat dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menghubungkan komunikasi politik, studi gender, feminisme, politik lokal, dan kajian keluarga politik.

5.3.3 Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dan lebih beragam. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga informan, yaitu Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat melibatkan istri pejabat dari berbagai daerah, tingkat pemerintahan, latar belakang partai politik, latar belakang profesi, dan konteks sosial yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pengalaman politik istri pejabat di Indonesia.

Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan pengalaman istri pejabat pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Perbandingan tersebut penting karena setiap tingkat pemerintahan memiliki struktur sosial-

politik, tuntutan publik, dan ruang komunikasi yang berbeda. Istri kepala daerah di tingkat kota mungkin memiliki kedekatan yang lebih langsung dengan masyarakat, sedangkan istri pejabat di tingkat provinsi atau nasional mungkin berhadapan dengan sorotan media dan kepentingan politik yang lebih luas.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan feminis kritis untuk menganalisis lebih jauh apakah peran istri pejabat dapat dipahami sebagai bentuk agensi politik perempuan, reproduksi kekuasaan patriarki, atau kombinasi keduanya. Penelitian ini belum menjangkau analisis tersebut secara mendalam karena menggunakan pendekatan naratif. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan perspektif feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme poststrukturalis, atau teori gender dan kekuasaan untuk membaca posisi perempuan dalam struktur politik keluarga pejabat secara lebih kritis.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pandangan masyarakat terhadap peran istri pejabat. Penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif istri pejabat, sehingga belum secara mendalam menggali bagaimana masyarakat, anggota organisasi, staf pemerintahan, atau kelompok penerima program memandang peran mereka. Dengan melibatkan perspektif masyarakat, penelitian berikutnya dapat menilai apakah peran istri pejabat benar-benar dirasakan manfaatnya atau hanya dipahami sebagai simbol pendampingan.

Selain masyarakat, penelitian berikutnya juga dapat melibatkan pihak-pihak yang bekerja langsung dengan istri pejabat, seperti pengurus PKK, anggota Dekranasda, staf protokoler, pejabat dinas terkait, kader Posyandu, komunitas UMKM, atau organisasi perempuan. Perspektif pihak-pihak tersebut penting untuk memverifikasi narasi istri pejabat dan mengurangi potensi bias narasi elite. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat menghasilkan analisis yang lebih seimbang antara narasi elite dan pengalaman pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan mereka.

Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan studi kasus komparatif untuk membedakan peran istri pejabat yang bersifat seremonial dan substantif. Kajian tersebut dapat meneliti kegiatan mana yang benar-benar memiliki dampak sosial, bagaimana program dirancang, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana keterlibatan istri pejabat dalam pelaksanaan program, serta bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, kajian mengenai istri pejabat tidak hanya berhenti pada deskripsi peran, tetapi dapat menilai kualitas dan dampak peran tersebut.

Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperhatikan aspek etika dan reflektivitas peneliti. Karena kajian mengenai istri pejabat melibatkan informan yang berada dalam posisi elite, peneliti perlu menjaga jarak analitis, melakukan verifikasi data, serta tidak menerima seluruh narasi informan sebagai kebenaran tunggal. Penelitian berikutnya perlu lebih terbuka dalam menjelaskan posisi peneliti, potensi bias, proses validasi data, serta batasan analisis agar hasil penelitian memiliki kredibilitas akademik yang lebih kuat.